



Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Terdampak Bencana Galodo Di Nagari Pasi Laweh Kabupaten Tanah Datar

^{1*}Novi Budiman, ² Ulya Fitri, ³ Mahmuda, ⁴ Mhd Alfahjri Sukri, ⁵ Dewi Dahlan,
⁶ Rita Handayani

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

ABSTRACT

Natural disasters not only cause physical and economic destruction but also disrupt civic engagement and political participation at the local level. However, limited scholarly attention has been given to how post-disaster political participation can be reconstructed through community-based and culturally grounded interventions. Drawing on political participation theory and the concept of political literacy, this study examines a Participatory Action Research (PAR) program conducted by lecturers and students of the Islamic Political Thought Study Program at UIN Mahmud Yunus Batusangkar in Nagari Pasi Laweh, Tanah Datar Regency, following the 2024 galodo disaster. The program implemented Focus Group Discussions (FGDs) with local stakeholders, political literacy training for women, and community-based anti-money politics campaigns ahead of the 2024 local elections. The findings reveal that participatory political education enhanced civic awareness, particularly among women and youth, revitalized local political discourse, and strengthened normative resistance to vote-buying practices. These outcomes indicate that community-based political literacy functions as a mechanism for post-disaster democratic recovery. The study proposes a contextual model of post-disaster political education that integrates participation, local cultural values, and democratic resilience, offering an adaptable framework for disaster-affected regions in strengthening local democracy.

Keywords: *Natural Disasters; Political Participation; Political Literacy; Participatory Action Research (PAR); Local Democracy.*

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Received: 24.04.2026 | Revised: 27.04.2026 | Accepted: 28.04.2026 | Available online: 10.05.2026 |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|

ABSTRACT

Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu partisipasi kewargaan dan kehidupan politik di tingkat lokal. Namun, kajian mengenai pemulihan partisipasi politik pascabencana melalui pendekatan berbasis komunitas masih relatif terbatas. Berangkat dari teori partisipasi politik dan literasi politik, penelitian ini menganalisis program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar di Nagari Pasi Laweh, Kabupaten Tanah Datar, pascabencana galodo tahun 2024. Program ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tokoh masyarakat dan lembaga nagari, pelatihan literasi politik bagi perempuan, serta kampanye anti politik uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis partisipasi mampu meningkatkan kesadaran kewargaan masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda, menghidupkan

¹ Corresponding Author Email: novibudiman@uinmybatusangkar.ac.id

kembali ruang diskursus politik lokal, serta memperkuat resistensi normatif terhadap praktik politik uang. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi politik berbasis komunitas berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial-politik pascabencana sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal. Studi ini menawarkan model konseptual pendidikan politik pascabencana yang mengintegrasikan partisipasi warga, nilai-nilai kearifan lokal, dan penguatan demokrasi, sehingga dapat diadaptasi pada wilayah rawan bencana lainnya dalam rangka memperkuat ketahanan demokrasi lokal.

Keywords: Bencana alam; Partisipasi Politik; Literasi Politik; Participatory Action Research (PAR); Demokrasi Lokal.

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Received: 24.04.2026 | Revised: 27.04.2026 | Accepted: 28.04.2026 | Available online: 10.05.2026 |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|

Suggested citation:

Budiman, Novi., et.al (2026). Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Terdampak Bencana Galodo Di Nagari Pasie Laweh Kabupaten Tanah Datar. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 134-149. DOI: 10.24235/dimasejati.51.000

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan elemen fundamental dalam demokrasi modern karena mencerminkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik yang menentukan arah kebijakan publik dan kehidupan sosial mereka (Almond & Verba, 1963). Tingginya tingkat partisipasi politik tidak hanya berkontribusi pada legitimasi sistem politik, tetapi juga menjadi indikator kualitas demokrasi substantif yang berorientasi pada keterlibatan warga secara sadar dan rasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan politik dan literasi demokrasi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, baik dalam pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia (Putri, 2017; Maulia, 2023; Kadir et al., 2024).

Namun demikian, partisipasi politik tidak berkembang secara seragam dalam seluruh konteks sosial masyarakat. Tingkat keterlibatan warga dalam aktivitas politik sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan situasional. Di Indonesia, kondisi geografis, keterbatasan akses pendidikan politik, serta situasi luar biasa seperti bencana alam terbukti memengaruhi dinamika partisipasi politik masyarakat (Hadiati, 2019; Wula et al., 2022). Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada aspek psikososial dan melemahkan struktur sosial-politik komunitas lokal. Dalam situasi pascabencana, perhatian masyarakat cenderung terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan kehidupan keluarga, sehingga urusan politik elektoral menjadi kurang mendapat perhatian.

Kondisi tersebut terlihat secara nyata dalam peristiwa bencana galodo yang melanda Nagari Pasie Laweh, Kabupaten Tanah Datar, pada tahun 2024. Tekanan ekonomi, trauma psikologis, serta ketidakpastian masa depan menyebabkan orientasi politik warga mengalami pergeseran sementara. Partisipasi dalam diskursus politik dan agenda Pilkada cenderung melemah karena masyarakat lebih memprioritaskan upaya bertahan hidup dan pemulihan pascabencana.

Literatur internasional menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap partisipasi politik bersifat kompleks dan tidak selalu menghasilkan pola yang sama. Penelitian Fair

et al. (2017) di Pakistan, misalnya, menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat terdampak banjir justru dapat meningkat apabila pemerintah dan masyarakat sipil mampu merespons dampak ekonomi secara efektif. Dalam konteks tersebut, warga memperoleh pembelajaran politik mengenai kapasitas negara dan terdorong untuk terlibat dalam proses elektoral. Sebaliknya, tinjauan sistematis yang dilakukan (Bagiyan & Bakunts, 2023) menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan bencana berpotensi meningkatkan ketangguhan komunitas, berbagai hambatan struktural sering kali membatasi kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Di Indonesia, kajian empiris mengenai hubungan antara bencana dan partisipasi politik masih relatif terbatas. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik, terutama di kalangan kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda, menjadi faktor penghambat utama partisipasi politik (Putri, 2017). Dalam konteks pascabencana, lemahnya literasi politik dapat memperparah penurunan partisipasi dan berimplikasi pada melemahnya legitimasi demokrasi lokal, khususnya menjelang Pilkada 2024.

Momentum Pilkada sejatinya merupakan kesempatan strategis bagi masyarakat terdampak bencana untuk memilih pemimpin yang memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi sosial. Namun, trauma kolektif, menyempitnya ruang publik, serta minimnya pendidikan politik partisipatif justru berpotensi menurunkan kualitas partisipasi pemilih. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Bovan et.al, 2018) yang menunjukkan bahwa bencana dapat menjadi hambatan serius bagi partisipasi politik apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pendidikan politik yang adaptif dan inklusif.

Meskipun berbagai studi telah menegaskan pentingnya literasi politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, namun kajian yang secara spesifik mengkaji kondisi masyarakat pascabencana dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia masih terbatas. Ketiadaan pendekatan yang adaptif terhadap situasi krisis berpotensi menurunkan partisipasi politik, melemahkan legitimasi demokrasi, serta meningkatkan kerentanan terhadap praktik politik transaksional, terutama pada kelompok rentan. Oleh karena itu, urgensi pengabdian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan model pendidikan politik yang kontekstual, responsif, dan inklusif.

Pemilihan Kabupaten Tanah Datar, khususnya Nagari Pasié Laweh, didasarkan pada kondisi sebagai wilayah terdampak langsung bencana galodo 2024 dengan konsekuensi sosial-ekonomi dan psikologis yang signifikan, serta memiliki struktur sosial berbasis nagari dan nilai adat yang kuat namun belum dioptimalkan sebagai medium pendidikan politik. Keterbatasan akses pendidikan politik dan rendahnya keterlibatan perempuan serta pemuda menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sosial lokal dan kapasitas partisipasi aktual. Dengan demikian, Nagari Pasié Laweh menjadi lokus strategis untuk mengembangkan model pendidikan politik berbasis komunitas yang kontekstual dan berpotensi direplikasi, guna mencegah penurunan kualitas partisipasi politik dan melemahnya legitimasi demokrasi lokal secara sistemik.

Pengabdian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk pengembangan model pendidikan politik berbasis komunitas yang secara spesifik dirancang untuk konteks masyarakat pascabencana dengan mengintegrasikan literasi politik, pendekatan

partisipatif, dan kearifan lokal sebagai instrumen penguatan demokrasi lokal. Oleh karena itu, pendidikan politik berbasis komunitas yang peka terhadap konteks budaya lokal menjadi kebutuhan mendesak. Literasi politik yang dikembangkan secara kultural terbukti mampu meningkatkan kesadaran warga mengenai hak dan tanggung jawab politik serta memperkuat kapasitas komunitas dalam menjaga kualitas demokrasi (Putri, 2017; Alfariysi et al., 2023).

Dengan demikian, intervensi literasi politik melalui pendekatan partisipatif tidak hanya relevan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial dalam merevitalisasi ruang publik dan kesadaran kolektif masyarakat. Kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak berhenti pada dampak jangka pendek, melainkan menjadi model pendidikan politik berkelanjutan yang memperkuat demokrasi lokal di Nagari Pasie Laweh.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu suatu pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial melalui kerja kolaboratif antara tim pengabdian dan komunitas sasaran. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek intervensi, melainkan sebagai subjek yang secara aktif terlibat dalam keseluruhan proses pengabdian, mulai dari pengenalan persoalan, perumusan kebutuhan, perencanaan tindakan, implementasi program, hingga evaluasi dan refleksi bersama. Dengan demikian, proses pengabdian yang dilakukan tidak bersifat top-down, tetapi berangkat dari pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan lokal masyarakat (Kemmis & McTaggart, 2005).

Pendekatan PAR dipandang relevan untuk diterapkan pada masyarakat pascabencana karena kondisi krisis sosial dan psikologis yang dihadapi warga membutuhkan strategi penguatan kapasitas partisipatif secara berkelanjutan. Melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, PAR memungkinkan terjadinya proses pembelajaran kolektif yang mendorong pemulihan sosial-politik secara inklusif. Hal ini sejalan dengan pandangan Reason dan Bradbury (2008) yang menekankan bahwa riset dan aksi partisipatif berperan penting dalam membangun transformasi sosial berbasis pengalaman komunitas.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dirancang dan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah observasi dan pemetaan sosial-politik, yang dilakukan melalui kunjungan lapangan, observasi partisipatif, serta wawancara awal dengan warga dan tokoh lokal di Nagari Pasie Laweh. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi sosial masyarakat pascabencana, pola relasi antaraktor lokal, tingkat partisipasi politik warga, serta berbagai bentuk kerentanan sosial-politik yang muncul setelah bencana galodo. Proses pemetaan ini menjadi fondasi penting dalam merancang program pengabdian yang kontekstual dan responsif terhadap realitas lokal, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan partisipatif berbasis pengetahuan masyarakat (Chambers, 2017).

Tahap kedua merupakan pelaksanaan program inti pengabdian, yang disusun berdasarkan temuan pemetaan awal dan dijalankan secara partisipatif bersama masyarakat. Program inti pengabdian mencakup tiga bentuk kegiatan utama. Pertama,

pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan tokoh adat, perangkat nagari, pemuda, dan unsur kelembagaan lokal lainnya. FGD ini bertujuan untuk merumuskan strategi kolektif dalam mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat secara inklusif dan beretika menjelang Pilkada 2024. Melalui FGD, berbagai perspektif dan pengalaman lokal dipertemukan dalam ruang dialog deliberatif untuk membangun kesepahaman bersama mengenai tantangan dan peluang demokrasi di tingkat nagari (Kindon et al., 2007).

Pada tahap ini, terdapat dua program yang dilakukan oleh tim pengabdian yakni kegiatan literasi politik bagi perempuan, yang difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban politik warga negara, penguatan kesadaran kritis, serta dorongan terhadap keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan posisi perempuan yang kerap berada pada lapisan marjinal dalam struktur politik desa, terlebih dalam situasi pascabencana yang meningkatkan beban domestik dan sosial. Oleh karena itu, intervensi literasi politik diarahkan untuk membangun kesadaran emansipatoris dan mendorong keadilan serta inklusivitas politik.

Program selanjutnya adalah kampanye anti politik uang sebagai bentuk edukasi politik masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai dampak negatif praktik politik transaksional terhadap kualitas demokrasi lokal. Kampanye ini dilaksanakan melalui diskusi publik dan penyampaian pesan-pesan edukatif yang disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat pascabencana. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif agar warga menolak praktik politik uang dalam proses elektoral serta memperkuat integritas demokrasi di tingkat lokal (Marsudi & Sunarso, 2019).

Tahap ketiga adalah refleksi dan tindak lanjut, yang dilakukan melalui evaluasi partisipatif bersama masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi perubahan pengetahuan dan sikap politik warga, serta merumuskan pembelajaran kolektif dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian. Proses refleksi diarahkan pada penyusunan rencana aksi berkelanjutan yang akan dilanjutkan oleh kelompok pemuda dan perempuan di tingkat nagari. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada intervensi jangka pendek, tetapi berkontribusi pada penguatan kapasitas lokal dan keberlanjutan praktik partisipasi politik yang demokratis (Reason & Bradbury, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Partisipasi Politik Pascabencana

Pasca terjadinya bencana galodo yang melanda Nagari Pasie Laweh pada awal tahun 2024, masyarakat menghadapi tekanan psikologis yang cukup berat. Kerusakan material dan nonmaterial yang dialami warga, disertai trauma akibat peristiwa bencana, mendorong sebagian besar masyarakat untuk memusatkan perhatian dan energi mereka pada upaya bertahan hidup serta pemulihan kondisi keluarga. Dalam situasi tersebut, isu-isu politik, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, cenderung dipersepsikan sebagai hal yang tidak mendesak dan berada di luar prioritas kebutuhan masyarakat. Pola ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa dalam konteks krisis, orientasi warga

sering bergeser dari partisipasi politik elektoral menuju pemulihan sosial dan ekonomi rumah tangga (Kondoh & Miyazaki, 2024).

Kondisi ini berdampak langsung pada melemahnya partisipasi politik dalam bentuk-bentuk konvensional. Aktivitas seperti menghadiri sosialisasi calon, mengikuti forum diskusi publik, maupun membicarakan visi dan misi kandidat hampir tidak terlihat dalam dua bulan pertama pascabencana. Sebagian warga menilai bahwa membicarakan politik kekuasaan di tengah suasana duka dan ketidakpastian sosial dianggap tidak pantas. Sikap tersebut mencerminkan adanya distorsi pemahaman terhadap politik, yang dipandang sebagai ranah elitis dan terpisah dari persoalan konkret yang sedang dihadapi masyarakat. Dalam perspektif *political efficacy*, situasi krisis semacam ini berpotensi melemahkan keyakinan warga bahwa keterlibatan mereka dalam proses politik dapat menghasilkan dampak yang nyata (Campbell et al., 1954).

Temuan hasil observasi lapangan dan wawancara awal yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara jelas jadwal maupun tahapan Pilkada 2024. Bahkan, tidak sedikit warga yang mengaku belum mengenal calon kepala daerah yang akan berkompetisi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterputusan yang cukup serius antara arus informasi politik dan realitas sosial masyarakat di tingkat lokal. Situasi tersebut semakin diperparah oleh kerusakan infrastruktur komunikasi, seperti listrik dan jaringan internet, akibat bencana. Sejumlah studi menegaskan bahwa terganggunya akses informasi pascabencana merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap menurunnya partisipasi politik masyarakat lokal (Shaw, 2012).

Dalam konteks ini, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh rendahnya partisipasi politik. Beban domestik yang meningkat secara signifikan pascabencana mulai dari pengasuhan anak, pengelolaan dapur umum, hingga pemenuhan kebutuhan keluarga menyisakan ruang yang sangat terbatas bagi perempuan untuk mengikuti perkembangan isu-isu politik. Keterbatasan literasi politik yang telah ada sebelumnya semakin memperdalam ketidakterlibatan perempuan dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Temuan ini memperkuat argumen bahwa bencana cenderung memperlebar kesenjangan gender dalam partisipasi politik, mengingat perempuan sering kali menanggung beban sosial yang berlipat ganda pada masa krisis (Kreutzer, 2023; O'Brien & Piscopo, 2023; Fair et al., 2017).

Di sisi lain, kelompok pemuda yang dalam kondisi normal sering berperan sebagai penggerak utama partisipasi politik justru menunjukkan penurunan keterlibatan dalam arena politik elektoral. Sebagian besar pemuda lebih banyak terlibat dalam aktivitas kerelawanan, distribusi bantuan, serta kerja-kerja kemanusiaan lainnya. Namun, keterlibatan tersebut tidak berkembang menjadi ruang advokasi politik atau diskusi mengenai agenda demokrasi lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk partisipasi dari politik elektoral menuju partisipasi sosial, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai studi tentang keterlibatan pemuda di wilayah terdampak krisis dan bencana (Nissen & Carlton, 2023).

Perangkat nagari dan lembaga-lembaga unsur, seperti Kerapatan Adat Nagari, Bamus, serta lembaga kemasyarakatan lainnya, juga mengakui bahwa agenda politik

bukan menjadi prioritas utama dalam rapat-rapat nagari pascabencana. Fokus perhatian mereka lebih diarahkan pada koordinasi bantuan, pemulihan fasilitas umum, serta pendataan ulang warga terdampak. Dalam kondisi seperti ini, penyelenggara Pilkada menghadapi kendala dalam melakukan sosialisasi karena tidak adanya titik temu antara agenda kelembagaan nagari dan kebutuhan elektoral. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, pemerintahan lokal cenderung menunda agenda demokrasi prosedural demi menjaga stabilitas sosial masyarakat (Boin & Hart, 2016).

Rendahnya partisipasi politik masyarakat pascabencana juga diperkuat oleh absennya pendidikan politik yang sensitif terhadap konteks kebencanaan. Masyarakat tidak memiliki rujukan maupun pengalaman tentang bagaimana seharusnya bersikap secara politik dalam situasi krisis. Padahal, berbagai pengalaman internasional menunjukkan bahwa proses rekonstruksi yang inklusif sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga dalam memilih pemimpin dan mengawal kebijakan pemulihan pascabencana (Aldrich & Meyer, 2018).

Dalam konteks budaya Minangkabau, praktik musyawarah dan mufakat selama ini menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan kolektif. Namun pascabencana, mekanisme tersebut turut mengalami gangguan. Kerusakan rumah gadang, tidak berfungsinya pusat-pusat kegiatan adat, serta kesibukan para tokoh adat dalam menangani persoalan komunitas masing-masing menyebabkan ruang deliberatif yang biasanya menjadi arena pembahasan arah politik nagari tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini mencerminkan melemahnya praktik demokrasi deliberatif di tingkat lokal akibat rusaknya ruang sosial pascabencana (Dryzek, 2016).

Selain itu, muncul kekhawatiran yang cukup kuat bahwa situasi krisis dapat membuka peluang bagi praktik politik uang. Melemahnya kondisi ekonomi masyarakat menjadikan sebagian warga berada dalam posisi yang rentan terhadap tawaran bantuan instan dari calon atau tim sukses tertentu. Kekhawatiran ini sejalan dengan berbagai temuan yang menunjukkan bahwa praktik vote buying cenderung meningkat pada komunitas yang secara ekonomi berada dalam kondisi rentan (Muhtadi, 2019).

Secara keseluruhan, kondisi awal partisipasi politik masyarakat Nagari Pasie Laweh pascabencana menunjukkan adanya stagnasi kolektif dalam merespons dinamika politik lokal. Tanpa adanya intervensi yang tepat, kontekstual, dan partisipatif, Pilkada 2024 berpotensi kehilangan kualitas substantif akibat rendahnya keterlibatan warga sebagai pemilih yang sadar dan kritis. Oleh karena itu, pelaksanaan program literasi politik, FGD bersama unsur nagari, serta kampanye anti politik uang menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial-politik di wilayah terdampak bencana.

2. Dinamika Persepsi Politik Tokoh Masyarakat Pascabencana

Dalam upaya menganalisis dinamika persepsi politik tokoh masyarakat dan unsur nagari pada situasi pascabencana, Focus Group Discussion (FGD) dipilih sebagai instrumen partisipatif utama. Metode ini dirancang untuk menelusuri pandangan, pengalaman, serta gagasan kolektif para pemangku kepentingan lokal terkait partisipasi politik, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Pada

konteks Nagari Pasie Laweh yang baru saja terdampak bencana galodo, FGD berperan sebagai ruang strategis untuk merekonstruksi kesadaran politik masyarakat sekaligus mengidentifikasi tantangan konkret yang dihadapi demokrasi lokal pascabencana.

Pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi di tingkat lokal membutuhkan ruang deliberatif yang inklusif agar aspirasi masyarakat terdampak dapat terartikulasikan secara kolektif (Habermas, 1996). Keterlibatan peserta dalam FGD mencakup berbagai elemen sosial utama di nagari, mulai dari tokoh adat, ulama, perangkat nagari, anggota Badan Musyawarah (Bamus), bundo kanduang, hingga pemuda. Pelibatan beragam unsur ini dimaksudkan untuk menangkap spektrum pandangan yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial-politik nagari dalam situasi pascabencana.



Gambar 1. FGD dan sosialisasi Pilkada 2024 di Nagari Pasie Laweh

Sumber: Dok. Tim PKM, 2024

Proses FGD difasilitasi secara terbuka dan deliberatif oleh tim pengabdian dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan mengedepankan pendekatan kultural Minangkabau yang berakar pada tradisi musyawarah dan mufakat. Para peserta didorong untuk merefleksikan perubahan kondisi sosial-politik nagari pascabencana, sekaligus mendiskusikan bagaimana pengalaman krisis tersebut memengaruhi orientasi serta semangat politik masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat menegaskan bahwa bencana telah mengguncang fondasi kehidupan komunal, termasuk menurunnya perhatian warga terhadap agenda politik nagari. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tekanan psikologis dan ekonomi pascabencana sering kali menggeser prioritas masyarakat dari partisipasi politik menuju pemenuhan kebutuhan dasar ((Duque Monsalve et al., 2024).

Hasil diskusi menunjukkan bahwa salah satu temuan penting adalah menguatnya persepsi bahwa politik masih dipandang sebagai ranah elitis yang kurang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi darurat. Pemilu dan Pilkada lebih sering dipahami sebagai rutinitas elektoral lima tahunan, bukan sebagai instrumen strategis untuk memilih pemimpin yang mampu mengartikulasikan kepentingan warga terdampak. Persepsi tersebut mencerminkan adanya jarak komunikasi yang signifikan antara elite politik lokal dan masyarakat nagari, suatu kondisi yang dalam literatur partisipasi politik dikenal sebagai krisis representasi (Aspinall & Sukmajati, 2016). Minimnya pendidikan politik selama masa pemulihan turut memperdalam kesenjangan tersebut.

Selain itu, diskusi juga mengemukakan kekhawatiran kolektif terkait potensi penyalahgunaan momentum Pilkada oleh aktor politik tertentu melalui praktik politik uang, terutama dengan menyasar masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Para peserta sepakat bahwa situasi pascabencana menciptakan bentuk kerentanan baru dalam demokrasi elektoral di tingkat lokal. Kekhawatiran ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan dapat meningkatkan risiko praktik transaksional dalam pemilu lokal (Aspinall, 2019; Muhtadi, 2019). Oleh karena itu, peserta FGD menekankan pentingnya membangun gerakan moral dan kultural yang berlandaskan nilai adat dan agama sebagai benteng sosial dalam menjaga integritas demokrasi di Minangkabau.

Sebagai tindak lanjut dari diskusi, FGD juga melahirkan gagasan untuk mengaktifkan kembali forum-forum musyawarah di tingkat jorong sebagai ruang diskusi politik warga. Forum-forum ini dipandang sebagai media yang relatif aman, kontekstual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat untuk membahas isu-isu Pilkada, baik melalui pertemuan informal di lapau maupun di surau. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya ruang diskusi di tingkat akar rumput sebagai basis pembentukan pilihan politik yang sadar dan reflektif (Tresiana et al, 2023)

Perhatian terhadap isu representasi perempuan turut mengemuka dalam dinamika diskusi. Sejumlah peserta menilai bahwa perempuan masih kerap ditempatkan sebagai objek politik dalam setiap momentum pemilu dan Pilkada. Salah seorang peserta perempuan menegaskan perlunya dorongan agar program dan platform calon kepala daerah benar-benar berorientasi pada penguatan serta pemberdayaan perempuan. Pandangan ini sejalan dengan konsep representasi substantif yang menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam demokrasi tidak cukup bersifat simbolik, tetapi harus tercermin secara nyata dalam agenda dan kebijakan publik (Krook & Zetterberg, 2014)

Secara umum, dinamika persepsi politik yang terungkap melalui FGD menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dan unsur kelembagaan lokal memegang peran strategis dalam membangkitkan kembali partisipasi politik warga pascabencana. Pendekatan kultural yang bersifat kolaboratif terbukti efektif dalam merekatkan kembali hubungan antara masyarakat dan politik lokal. Temuan ini menjadi pijakan awal dalam merancang strategi pengabdian lanjutan, khususnya melalui program literasi politik perempuan dan kampanye anti politik uang, sekaligus menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik demokrasi.

3. Literasi Politik Perempuan dalam Konteks Demokrasi Lokal Pascabencana

Salah satu orientasi strategis dalam pelaksanaan program pengabdian ini diarahkan pada penguatan literasi politik bagi perempuan. Penetapan fokus tersebut didasarkan pada realitas empiris bahwa dalam berbagai kajian, perempuan di wilayah pedesaan masih sering berada pada posisi pinggiran dalam diskursus dan praktik politik lokal. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kuatnya budaya patriarki, serta keterbatasan akses terhadap informasi politik yang

memadai (Krook & Restrepo Sanín, 2016). Padahal, perempuan merupakan kelompok pemilih yang signifikan secara kuantitatif dan memiliki peran strategis dalam membentuk opini politik di lingkungan keluarga maupun komunitas, terutama dalam masyarakat komunal seperti nagari.

Di Nagari Pasie Laweh, situasi tersebut diperparah oleh dampak bencana galodo yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga meningkatkan beban kerja domestik yang harus ditanggung perempuan. Kondisi pascabencana ini secara tidak langsung mempersempit ruang partisipasi publik perempuan dan menempatkan mereka dalam posisi yang semakin rentan, baik secara sosial maupun politik. Temuan ini sejalan dengan sejumlah kajian yang menunjukkan bahwa bencana alam cenderung memperdalam ketimpangan gender dalam akses terhadap ruang publik dan proses pengambilan keputusan (Bradshaw & Fordham, 2015);



Gambar 2. Kegiatan Literasi Politik Perempuan di Nagari Pasie Laweh

Sumber: Dok Tim PKM, 2024

Pelaksanaan kegiatan literasi politik dilakukan melalui pelatihan intensif selama satu hari penuh yang melibatkan sekitar 40 peserta perempuan dengan latar belakang yang beragam, mulai dari anggota PKK, kader Posyandu, jamaah majelis taklim, hingga pelaku UMKM. Rancangan pelatihan mengadopsi pendekatan andragogi yang menekankan dialog partisipatif, refleksi atas pengalaman hidup peserta, serta pembelajaran yang kontekstual dengan realitas sehari-hari. Pendekatan ini dipandang relevan dalam pendidikan politik orang dewasa karena mampu mengaitkan pengalaman personal peserta dengan persoalan politik yang mereka hadapi secara langsung (Azhar et al, 2024).

Materi pelatihan difokuskan pada tiga tema utama, yakni hak-hak politik perempuan, pentingnya peran sebagai pemilih yang cerdas, serta strategi menolak praktik politik uang dalam konteks pemilihan kepala daerah. Pada tahap awal kegiatan, fasilitator menyampaikan pemaparan mengenai sejarah partisipasi politik perempuan di Indonesia serta landasan hukum yang menjamin kesetaraan hak politik. Diskusi ini bertujuan untuk membuka pemahaman peserta bahwa perempuan memiliki hak dan posisi yang setara dalam menentukan arah politik lokal, termasuk dalam Pilkada 2024. Peningkatan kesadaran tersebut menjadi penting mengingat rendahnya literasi hukum dan politik sering kali menjadi faktor penghambat utama partisipasi politik perempuan di tingkat lokal (Kahpi dan Harahap, 2024). Sejumlah peserta mengakui bahwa melalui sesi ini mereka baru menyadari nilai strategis suara politik perempuan dalam menentukan kepemimpinan daerah.

Sesi berikutnya diarahkan pada penguatan kapasitas peserta sebagai pemilih yang rasional dan kritis. Peserta diajak untuk mengenali berbagai bentuk kampanye politik, memahami profil calon kepala daerah, serta mengikuti simulasi analisis visi dan misi kandidat dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dalam situasi pascabencana. Melalui kerja kelompok, peserta menyusun indikator calon pemimpin ideal, seperti sensitivitas terhadap kebutuhan ibu rumah tangga, keberpihakan pada pemulihan ekonomi mikro, serta komitmen terhadap perlindungan kelompok rentan. Proses ini mencerminkan praktik literasi politik substantif, di mana warga tidak hanya berpartisipasi secara prosedural, tetapi juga mampu menilai kualitas kepemimpinan dan substansi kebijakan secara kritis (Putri, 2025).

Di luar penyampaian materi, kegiatan literasi politik juga menyediakan ruang diskusi terbuka bagi peserta untuk mengidentifikasi isu-isu perempuan yang dianggap mendesak untuk diperjuangkan dalam Pilkada. Beberapa isu yang mengemuka antara lain layanan kesehatan ibu dan anak, akses pendidikan anak pascabencana, serta dukungan dan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan domestik. Diskusi ini menunjukkan bahwa literasi politik tidak hanya berfungsi meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif perempuan terhadap kepentingan politik bersama.

Dalam kerangka *Participatory Action Research* (PAR), kegiatan literasi politik ini tidak diposisikan semata sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai bagian dari siklus aksi, refleksi dan transformasi sosial. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi, simulasi, dan perumusan isu-isu prioritas menunjukkan bahwa perempuan diperlakukan sebagai subjek yang merefleksikan pengalaman pascabencana dan menerjemahkannya ke dalam kepentingan politik kolektif. Proses tersebut sejalan dengan prinsip PAR yang menekankan pembelajaran bersama, pengembangan kesadaran kritis, serta perubahan sosial berbasis pengalaman komunitas (Kemmis, McTaggart, & Nixon, 2014). Dengan demikian, literasi politik perempuan di Nagari Pasie Laweh tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kembali kualitas demokrasi lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam konteks pascabencana.

4. Resistensi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pilkada Pascabencana

Kampanye anti politik uang merupakan salah satu komponen strategis dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim. Inisiatif ini berangkat dari kekhawatiran yang mengemuka dalam rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dan kegiatan literasi politik perempuan terkait potensi menguatnya praktik *vote buying* di tengah masyarakat terdampak bencana. Dalam situasi pascabencana galodo, melemahnya kondisi ekonomi warga dipandang membuka ruang bagi kandidat atau tim sukses yang tidak bertanggung jawab untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat melalui pemberian uang tunai maupun bantuan sembako. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik uang tetap memiliki daya pengaruh terhadap perilaku pemilih yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. (Hansiden & Supit, 2025).



Gambar 3. Kampanye Anti Politik Uang

Sumber: Dok Tim PKM, 2024

Dalam pelaksanaannya, kampanye ini mengadopsi pendekatan visual karena dinilai lebih mudah dipahami, komunikatif, serta selaras dengan simbol dan nilai budaya lokal. Salah satu media utama yang digunakan adalah spanduk dan banner bertema anti politik uang yang dipasang di sejumlah titik strategis di Nagari Pasie Laweh. Spanduk dan banner tersebut memuat pesan-pesan moral dan edukatif yang berfungsi sebagai medium refleksi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak destruktif politik uang terhadap kualitas demokrasi lokal (Birner et al., 2021, Fathol Bari. (2023)).

Pemasangan spanduk dilakukan di lokasi-lokasi dengan tingkat mobilitas warga yang tinggi, seperti masjid, surau, lapau, kantor wali nagari, pos ronda, serta jalan utama antar jorong. Penentuan titik-titik tersebut didasarkan pada hasil observasi lapangan dan diskusi dengan tokoh masyarakat mengenai ruang publik yang efektif dalam membentuk opini dan kesadaran warga. Selain spanduk, tim pengabdian juga mendistribusikan selebaran berukuran kecil yang berisi penjelasan singkat mengenai politik uang, dampaknya terhadap demokrasi, serta langkah-langkah kolektif untuk menolaknya.

Di samping penggunaan media visual, tim pengabdian melakukan pendekatan informal melalui dialog langsung dengan warga di lapau, masjid, surau dan musala. Interaksi ini membuka ruang reflektif bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman terkait tekanan politik maupun godaan material dari pihak-pihak tertentu. Tantangan sempat muncul ketika sebagian pihak menilai pemasangan spanduk sebagai bentuk keberpihakan politik. Oleh karena itu, tim pengabdian menegaskan bahwa kampanye ini bersifat netral, tidak menysasar individu maupun partai politik tertentu, dan murni ditujukan sebagai pendidikan politik warga. Penegasan netralitas tersebut menjadi krusial agar kampanye tidak dipersepsikan sebagai bagian dari kontestasi politik praktis.

Dampak awal dari kampanye ini terlihat dari meningkatnya intensitas diskusi warga mengenai kualitas calon pemimpin, termasuk program pemulihan ekonomi, skema bantuan pascabencana, serta komitmen kandidat dalam memberdayakan masyarakat lokal. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemilih dari pragmatisme transaksional menuju rasionalitas yang lebih substantif. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran politik warga dapat mengurangi daya tarik politik uang sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal (Bora & Susu, 2024).

Dari sudut pandang akademik, pengalaman ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik berbasis komunitas dapat berfungsi sebagai mekanisme proteksi demokrasi, khususnya dalam situasi krisis. Teori demokrasi deliberatif menekankan pentingnya penyediaan ruang diskusi yang inklusif untuk menumbuhkan kesadaran kritis warga. Dalam konteks Nagari Pasie Laweh, kampanye anti politik uang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membentuk pengalaman kolektif masyarakat dalam menolak praktik politik transaksional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Participatory Action Research (PAR) yang menekankan pembelajaran reflektif, aksi bersama, serta transformasi sosial berbasis komunitas.

Lebih lanjut, praktik kampanye ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya lokal dan ikatan komunal dapat berfungsi sebagai benteng kultural terhadap manipulasi politik. Ketika masyarakat diberdayakan melalui pendekatan yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, pengaruh politik uang dapat diminimalkan (Bayo & Santoso, 2019).

Secara keseluruhan, pengalaman kampanye anti politik uang ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang bersifat partisipatif, visual, dan berbasis budaya lokal tidak hanya mendorong resistensi terhadap praktik politik uang, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kapasitas demokrasi lokal secara lebih luas. Temuan ini menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak semata-mata berkaitan dengan aspek fisik dan ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial-politik dan etis yang perlu diperkuat melalui keterlibatan aktif masyarakat.

SIMPULAN

Pelaksanaan program pengabdian ini memperlihatkan bahwa penguatan partisipasi politik masyarakat pascabencana dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan yang berakar pada komunitas, bersifat inklusif, dan disesuaikan dengan konteks sosial lokal. Melalui rangkaian kegiatan berupa *Focus Group Discussion* (FGD), literasi politik bagi perempuan, serta kampanye anti politik uang, masyarakat Nagari Pasie Laweh mulai menunjukkan tumbuhnya kesadaran baru mengenai urgensi keterlibatan aktif dalam proses demokrasi lokal menjelang Pilkada 2024. Sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, perangkat nagari, kelompok perempuan, dan pemuda membuktikan bahwa partisipasi politik tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis elektoral, melainkan merupakan bagian integral dari proses pemulihan sosial dan penguatan tata kelola nagari pascabencana.

Secara lebih luas, pendekatan partisipatif yang diterapkan oleh tim pengabdian berhasil menghadirkan ruang pendidikan politik yang kontekstual dan dekat dengan realitas kehidupan masyarakat. Pemanfaatan media visual seperti spanduk, penggunaan bahasa Minangkabau, diskusi berbasis musyawarah, serta materi literasi politik yang berangkat dari kebutuhan nyata warga, telah membangun fondasi bagi terbentuknya pemilih yang lebih rasional, kritis, dan mandiri. Kampanye anti politik uang tidak hanya berfungsi sebagai simbol penolakan terhadap praktik transaksional, tetapi juga menjadi langkah praktis dalam meneguhkan kembali nilai-nilai demokrasi yang jujur dan bermartabat. Capaian ini menunjukkan potensi pengembangan model pengabdian serupa untuk diterapkan

di wilayah lain yang menghadapi dinamika politik dan sosial pascabencana dengan karakteristik yang sebanding. Dengan demikian, model pendidikan politik berbasis komunitas yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal terbukti mampu menjawab permasalahan rendahnya partisipasi politik masyarakat pascabencana di Nagari Pasie Laweh.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, atas penerimaan yang hangat serta partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan peningkatan partisipasi politik pascabencana galodo.

Apresiasi juga diberikan kepada Wali Nagari Pasie Laweh beserta jajaran perangkat nagari, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kandung, dan relawan lokal atas dukungan, fasilitasi, serta keterlibatan yang sangat berarti dalam kelancaran kegiatan. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Tanah Datar atas dukungan informasi dan kolaborasi dalam upaya pendidikan politik masyarakat menjelang Pilkada Serentak 2024.

Penghargaan yang tinggi juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Mahmud Yunus Batusangkar atas dukungan kelembagaan dan pendanaan yang memungkinkan kegiatan ini terlaksana secara optimal. Terakhir, terima kasih kepada mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam atas dedikasi, kerja lapangan, dan pendampingan yang penuh komitmen selama proses pengabdian berlangsung. Terakhir, harapan penulis dan tim pengabdian. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nagari Pasie Laweh serta menjadi kontribusi berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan politik yang humanis dan berbasis kearifan lokal di Sumatera Barat.

REFERENSI

- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2018). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu melalui pendidikan demokrasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1), 60–68. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766>
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Aspinall, E. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Azhar, K., Yuliandri, P., Hartanto, H., & Indrawan, J. (2024). A model for developing political training curriculum for political parties in Indonesia. *Politika*, 15(2), 161–179. <https://doi.org/10.14710/politika.15.2.2024.161-179>
- Bagiyan, V., & Bakunts, S. (2023). Community-based natural disaster resilience: Chances and challenges. *Chgnazhamajin Kařavarum Ev Tekhnologianer*, 44–51. <https://doi.org/10.61746/18292984-2023.2-44>
- Bayo, L. N., & Santoso, P. (2019). Breaking the chains of transactionalism: A village election without money politics in Panggunharjo. *Preventing Chronic Disease*, 7(2), 283–315. <https://doi.org/10.22146/PCD.52726>
- Birner, R., Gupta, S., & Sharma, N. (2021). Political participation under crisis conditions. *World Development*, 138, 105256. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105256>

- Boin, A., & 't Hart, P. (2016). *Governing the crisis: The politics of disaster*. Cambridge University Press.
- Bora, N. A., & Susu, M. T. . (2024). Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa . *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 3879-3885. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4519>
- Bovan, K., Banai, B., & Pavela Banai, I. (2018). Do natural disasters affect voting behavior? Evidence from Croatian floods. *PLOS Currents Disasters*, 1, 1–15.
- Bradshaw, S., & Fordham, M. (2015). *Double disaster: Disaster through a gender lens*. Springer.
- Campbell, A., Gurin, D., & Miller, W. E. (1954). *The voter decides*. Row, Peterson, and Company.
- Carreras, M., & Castañeda-Angarita, N. (2019). Economic adversity and electoral participation of vulnerable socioeconomic groups. *Electoral Studies*, 57, 110–120. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.11.004>
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Practical Action Publishing
- Clayton, A., Josefsson, C., & Wang, V. (2017). Quotas and women's substantive representation: Evidence from a content analysis of Ugandan plenary debates. *Politics & Gender*, 13(2), 276–304. <https://doi.org/10.1017/S1743923X16000453>
- Duque Monsalve, L. F., Navarrete Valladares, C. P., & Sandoval Díaz, J. (2024). Relationship between political participation and community resilience in the disaster risk process: A systematic review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111, 104751. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104751>
- Enia, J. (2016). Rules versus discretion: Comparing disaster declaration institutions in the Philippines and Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 16, 158–166. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2016.02.010>
- Fair, C. C., Kuhn, P. M., Malhotra, N., & Shapiro, J. N. (2017). Natural disasters and political engagement: Evidence from the 2010–11 Pakistani floods. *Quarterly Journal of Political Science*, 12(1), 99–141. <https://doi.org/10.1561/100.00015075>
- Fathol Bari. (2023). Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 268–282. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468>
- Hadiati, T. L., Nugroho, H. A., & Utomo, D. T. B. (2022). Voters' political participation in the COVID-19 pandemic according to the geography and topography condition of the region (Study on the 2020 regional head election in Pekalongan Regency). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(3), 391–407. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i3.40812>
- Hansiden, P. E., & Supit, B. F. (2025). Pengaruh Money Politic terhadap Keputusan Memilih Pemilih di Kabupaten Minahasa pada Pemilu 2024. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 5(1), 45–52. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v5i1.3343>
- Kadir, A., Burhan, B., Mahrudin, M., & Sumardona, S. (2024). Women and family-based voter education strategy to increase community participation in elections in Buton, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(3), 1346–1360. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24050>
- Kahpi, m., & harahap, a. (2024). Analisis Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia: Faktor Penghambat Dan Pendorong. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 8(1), 64 - 77. doi:<https://doi.org/10.24952/gender.v8i1.11067>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory action research approaches and methods*. Routledge.
- Kondoh, H., & Miyazaki, T. (2024). Do natural disasters affect local elections? An empirical examination using subnational electoral data. *European Political Science Review*. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12272>

- Kreutzer, W. (2022). Women's support shaken: A study of women's political trust after natural disasters. *Politics & Gender*, 1–31. <https://doi.org/10.1017/S1743923X22000289>
- Krook, Mona & Restrepo, Juliana. (2016). Violence Against Women in Politics. A Defense of the Concept. *Política y gobierno*. 23. 459-490.
- Krook, M. L., & Zetterberg, P. (2014). Introduction: Gender Quotas And Women's Representation—New Directions In Research. *Representation*, 50(3), 287–294.
- Levine, A., & Dryzek, J. S. (2002). Book Reviews [Review of *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*]. *Ethics*, 112(3), 611–613. <https://doi.org/10.1086/338608>
- Loh, C. G. (2016). The everyday emergency: Planning and democracy under austerity regimes. *Urban Affairs Review*, 52(5), 832–863. <https://doi.org/10.1177/1078087415577639>
- Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi pendidikan politik melalui pembentukan kampung anti money politic. *JPPUMA*, 7(2), 111–121. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2303>
- Muhtadi, B. (2019). The determinants of vote buying: The profile of typical vote “sellers.” In *Vote buying in Indonesia* (pp. 81–107). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3_3
- Nissen, S., & Carlton, S. (2023). The civic legacies of disaster for youth political agency. *Political Geography*. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102970>
- O'Brien, D. Z., & Piscopo, J. M. (2023). Gender and political representation in times of crisis. *Politics & Gender*, 1–9. <https://doi.org/10.1017/S1743923X22000228>
- Putri, N. E. (2017). Dampak literasi politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu. *Agregasi: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>
- Putri, R. A. (2025). Demokrasi dalam krisis partisipasi: Perlukah membangun pendidikan kebijakan publik dan hukum untuk generasi muda? *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 13(1). <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i2.292>
- Tresiana, N., Duadji, N., & Suwarno, P. (2023). Deliberative democracy innovations at citizen level: Challenges of local government in Indonesia. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 21(4), 807–832. [https://doi.org/10.4335/21.4.807-832\(2023](https://doi.org/10.4335/21.4.807-832(2023)
- Tjahjoko, G. T. (2020). Fighting money politics and shamanic practices. *Jurnal Politik*, 5(2), 169–198. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i2.241>
- Wula, Z. (2019). The effect of socio-cultural factors on political participation of rural communities in Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 91(7), 42–45. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-07.05>

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2023 Budiman, Novi., et.al.

Published by LP2M of IAIN Syekh Nurjati Cirebon